

## Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana politik penyediaan air di Semarang membentuk ketimpangan akses air warga miskin kota. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan teori privatisasi air Bakker dan teori akses Ribot & Peluso. Melalui pendekatan ekologi politik, tulisan ini mencoba memahami dan menganalisis politik penyediaan air bersih. Tesis ini memiliki lima temuan kritis: *pertama*, hubungan sosial-alam, politik-ekonomi, dan materialitas air mengalami perubahan ekologis. *Kedua*, krisis ekologis air dari tata kelola alih fungsi lahan yang buruk, eksploitasi air bawah tanah yang ekstrim, sistem drainase dan pembuangan limbah yang tidak terintegrasi, serta banjir yang sering terjadi. *Ketiga*, ketersediaan air membutuhkan teknologi dan modal yang signifikan untuk memproses, memproduksi, dan mendistribusikan air untuk dapat dimanfaatkan. Sehingga menimbulkan ketimpangan akses terhadap air. *Keempat*, Kota Semarang mengambil pilihan untuk melibatkan pihak swasta untuk meningkatkan pasokan air bersih. Mempertimbangkan air sebagai hak asasi manusia, skema privat harus mendorong akses air bagi masyarakat miskin. Namun, air yang diperlakukan sebagai komoditas baik produksi maupun distribusi, seringkali menjauh dari hak rakyat atas air. *Kelima*, untuk memenuhi kebutuhan air, tesis ini juga mengeksplorasi dua skema rejim air yang berdampingan mengisi ketimpangan akses air. Terkait dengan kualitas air, rejim air berbasis masyarakat dan usaha kecil masih perlu dilakukan proses pengolahan dengan melibatkan rejim swasta. Selain itu, rejim air privat menyebabkan penurunan muka tanah akibat ketimpangan akses sebagai implikasinya. Oleh karena itu, masyarakat miskin menghadapi kualitas air yang buruk dan penurunan tanah, membuat hidup mereka lebih rentan terhadap perubahan ekologis kota.

Kata Kunci: *akses, ketimpangan, penyediaan air, privatisasi air, warga miskin,*

## Abstract

*This research explores how the politics of water supply in Semarang shapes the urban poor's inequality of access to water. This research employs a qualitative method, using Bakker's theory of water privatization and Ribot & Peluso's access theory. Through a political ecology approach, this article tries to understand and analyze the politics of the water supply. This thesis has four critical findings: first, the ecological change of socio-natural, political-economic relations, and the materiality of water. Second, the ecological crisis of water has begun with bad governance of land conversion, extreme exploitation of underground water, non-integrated drainage and waste disposal systems, and frequent flooding. Third, water availability requires technology and significant capital for the water process, production and distribution until it becomes drinkable or useable. Hence, it creates water inequality on access. Fourth, the city of Semarang has chosen the private sector to get support for a clean water supply. Considering water as a human right, the private scheme should make an affirmative scheme for the poor. However, water performs as a commodity both in production and distribution and is far from aiming for the people right's of water. Fourth, To fulfil the water needs, this thesis also explores two schemes of water regimes that coexist to fill the inequality of water access. However, regarding water quality, both community based and small entrepreneurship based water regimes still need to be made to the private regime. Furthermore, the local company water regime is causing land subsidence. Hence, the poor face terrible water quality and land subsidence, making their lives more vulnerable.*

**Keywords:** access, inequality, poor people, water privatization, water supply,